

# Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemungutan Pajak Hotel Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Di Kabupaten Garut Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut

Desi Qoriah<sup>1</sup>; Muslim Al Kautsar<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Garut qdesi\_27@yahoo.co.id

<sup>2</sup> Universitas Garut malkautsar@uniga.ac.id

#### Abstract

This study entitled: The Effect of Hotel Tax Collection Internal Control System on the Effectiveness of Hotel Tax Receipts in Garut Regency at the Regional Revenue Agency of Garut Regency. The purpose of this study was to determine how the influence of the Hotel Tax Collection Internal Control System on the Effectiveness of Hotel Taxes in Garut Regency on Regional Revenue Bodies. The method used in this research is quantitative descriptive method. The data collection technique uses library research, interviews, questionnaires and documentation, while the data processing techniques are performed using correlation analysis, simple regression analysis and the coefficient of determination. The results showed that the Hotel Tax Collection Internal Control System at the Regional Revenue Agency (BAPENDA) Garut Regency has a significant effect on the Effectiveness of Hotel Tax Receipts in Garut Regency.

**Keywords:** Hotel Tax Revenue Effectiveness, Internal Control System, and Tax Collection.

# 1 Pendahuluan

Pembangunan nasional saat ini meliputi segala bidang dan tentunya perlu mendapatkan perhatian serius baik dari pihak pemerintah ada khususnya maupun masyarakat pada umumnya. Pembangunan itu sendiri hanya dapat dilaksanakan apabila ada dana yang tersedia. Dana tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber baik dari dalam maupun luar negeri, baik sektor swasta maupun pemerintah. Salah satu sumber penerimaan dari dalam negeri adalah dari sektor pajak yang merupakan bentuk pengabdian dan peran secara langsung kepada masyarakat dalam mensukseskan pembangunan nasional, juga merupakan salah satu bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang No.32 Tahun 2004 terdiri dari:

- 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- 2. Dana Perimbangan yaitu:
  - a. Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
  - b. Dana Alokasi Umum
  - c. Dana Alokasi Khusus
  - d. Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Provinsi

### 3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Tabel 1 Data Perkembangan Pemungutan Pajak Hotel Daerah Kabupaten Garut Tahun 2013-2016

Tahun	Target	Realisasi	Presentase (%)
2013	Rp. 3.400.000.000	Rp. 4.024.471.325	118,37
2014	Rp. 5.065.000.000	Rp. 5.842.751.881	115,39
2015	Rp. 6.582.000.000	Rp. 6.424.349.204	97,50
2016	Rp. 7.100.000.000	Rp. 7.363.636.722	102.41

Sumber: Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Garut, 2016 (data diolah kembali).

Berdasarkan perkembangan pajak hotel Kabupaten Garut yang terangkum dalam tabel diatas menunjukkan bahwa pajak hotel Kabupaten Garut mengalami peningkatan setiap tahunnya, tetapi dalam presentasenya menurun. Hal tersebut dapat dikarenakan jumlah hunian hotel di Garut yang tidak selalu sama dalam artian dapat meningkat ataupun menurun dan juga efektifitas pengendalian intern dalam pemungutan pajak yang dapat mempengaruhi hal tersebut. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam tulisan dengan judul "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemungutan Pajak Hotel terhadap Efektifitas Penerimaan Pajak Hotel Di Kabupaten Garut Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut".

## 2 Tinjauan Pustaka

Menurut Dadang Suwanda & Dailibas (2013) tentang sistem pengendalian intern pemerintah, mengemukakan unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya, melalui komitmen, melalui kompetensi, pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat.

# 2. Penilaian Resiko

Pimpinan instansi pemerintah wajib menentukan penilaian resiko. Penilaian resiko sebagaimana dimaksud terdiri dari identifikasi resiko dengan menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan instansi pemerintah pada tingkatan kegiatan secara konfrehensif, menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali resiko serta menilai faktor lain yang dapat meningkatkan resiko dan analisis resiko dilaksanakan untuk menentukan dampak dari resiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi pemerintah yang menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat resiko yang dapat diterima.

Dalam rangka penilaian resiko pimpinan instansi pemerintah menetapkan: tujuan instansi pemerintah yang wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai dan tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan memperhatikan sumber daya yang cukup.

## 3. Kegiatan Pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah sebagai berikut: review atas kinerja, pemisahan fungsi, dokumentasi pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian.

### 4. Informasi dan Komunikasi

Pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif sebagaimana yang dimaksud pimpinan instansi pemerintah harus menyediakan dan

memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi dan mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

### 5. Pemantauan

Pemantauan sistem pengendalian intern sebagaimana dilaksanakan dengan pemantauan berkelanjutan melalui kegiatan pengelolaan rutin, rekonsiliasi, evaluasi terpisah melalui penilaian sendiri, pengujian efektivitas sistem pengendalian intern, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya.

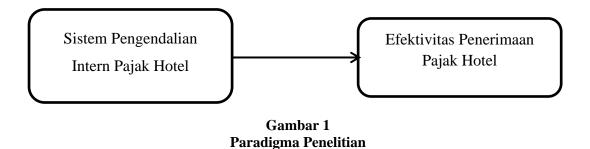
# Hubungan Sistem Pengendalian Intern Pemungutan Pajak Hotel terhadap Efektifitas Penerimaan Pajak Hotel

Dalam sistem pengendalian intern pemungutan pajak hotel tentu sangat berhubungan dengan Efektifitas pajak hotel. Karena suatu pengendalian yang efektif dan efesien sangat dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan, karena adanya sistem pengendalian internal diharapkan semua yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik. Dan Menurut Mulyadi (2010: 166) untuk menciptakan sistem pengendalian intern yang baik, ada empat unsur pokok yang harus dipenuhi antara lain:

- Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.
- Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya.
- Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.
- Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.

Efektivitas Menurut Edward (2013) Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dan dengan tujuan tau sasaran yang arus dicapai. Dikatakan efektif jika proses kegaiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapian tujuan dan sasaran yang ditentukan maka semakin efektif proses kerja suatu unit. Efektivitas merupakan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang didapatkan dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Dari definisi diatas dapat diperoleh kesimpulan bahwa efektivitas merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur tingkat kinerja dengan melihat kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Maka dari itu hubungan dalam sistem pengendalian intern pemungutan pajak terhadap efektifitas penerimaan pajak hotel saling berkaitan.



# 3 Metodologi Penelitian

### Jenis Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dan verifikatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyusun, mengolah data, dan menganalisis data yang diperoleh. Menurut Mohammad (2012:54).

# Tempat dan waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara langsung di BAPENDA adapun penelitian dimulai dari bulan juli 2017 sampai November 2017

### Metode analisis data

Metode yang digunakan untuk menguji adalah analisis regresi liniear berganda dengan bantuan program SPSS 23.0. Alasan penggunaan alat analisis regresi linear berganda adalah karena regresi liniear berganda adalah karena regresi liniear berganda cocok digunakan untuk menganalisis pengaruh lebih dari dua variabel.

## 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berikut merupakan hasil statistik dalam penelitian ini:

Tabel 2 Nilai Statistik Residual

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	108,1300	112,3500	110,2400	2,98399	2
Residual	,00000	,00000	,00000	,00000	2
Std. Predicted Value	-,707	,707	,000	1,000	2
Std. Residual					0

a. Dependent Variable: y

Dari tabel tersebut, menunjukkan bahwa uji normalitas dengan program *SPSS* tidak keluar dikarenakan data yang digunakan sempu

Tabel 3 Regresi Linier Sederhana

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.				
		В	Std. Error	Beta						
1	(Constant)	-160,148	,000							
1	X	4,396	,000	1,000						

a. Dependent Variable: y

Berdasarkan hasil *output SPSS* menunjukkan konstanta a sebesar (-160,148) dan nilai b yaitu koefisien X sebesar (4,396). Maka dari perhitungan yang telah dilakukan, ditentukan persamaan regresi sebagai berikut:

Y = -a + bx

Y = -160,148 + 4,396

Berdasarkan koefisien regresi yang diperoleh dapat dijelaskan bahwa pengaruh sistem pengendalian intern pemungutan pajak hotel (X) terhadap efektifitas pajak hotel (Y) adalah positif. Diperoleh koefisien regresi 4,396.

## 5 Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemungutan Pajak Hotel terhadap Efektifitas Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Garut Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut, maka yang menjadi simpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Sistem Pengendalian Intern Pemungutan Pajak Hotel Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Garut sudah dilaksanakan dengan baik, karena telah menciptakan dan memelihara sistem pengendalian intern pemungutan pajak hotel yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya.
- 2. Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Garut tahun 2013 2016 mengalami kenaikan realisasi dan menurun dalam persentasenya. Dengan kata lain kenaikan penerimaan pajak hotel disebabkan karena kenaikan realisasi dari target pemungutan pajaknya.
- 3. Sistem Pengendalian Intern Pemungutan Pajak Hotel Pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Garut berpengaruh sebesar 51,3% terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Garut.

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti memberikan saran atau rekomendasi yang dapat memberikan manfaat. Adapun saran yang diberikan yaitu:

- 1. Pada Bandan Pendapatan Daera (BAPENDA) Kabupaten Garut sebaiknya perlu di adakan pendekatan pengembangan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan yaitu *off the job training* dan *on the job training* untuk memahami pengembangan rencana yang secara jelas menggambarkan program pengaman serta kebijakan dan prosedur yang mendukungnya.
- 2. Meskipun selama 4 tahun terakhir (2013 2016) pertumbuhan realisasi pajak hotel seringkali melebihi target yang diharapkan dan dalam presentasenya menurun. sebaiknya petugas pemungutan pajak harus lebih giat memantau objek pajak dan melakukan pendataan yang lebih efektif sehingga kedepannya efektivitas penerimaan pajak hotel pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) di kabupaten Garut dapat di pertahankan dan ditingkatkan di masa mendatang.

### **Daftar Pustaka**

- Abdurahmat. (2008). Efektivitas Organisasi Edisi Revisi. Jakarata: Airlangga
- Ali, Mohammad. (2012). Metodologi dan Aplikasi Riset Pendidikan. Jakarta: PT Bumi Askara.
- Arifin, S. (2006). *Efektivitas Kebijaksanaan Suku Bunga Dalam Ranga Stabilitas Rupiah Di Masa Kritis*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Arikunto. (2010). Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi 2010. Jakarta: Renika Cipta
- Edward. (2013). Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. Jurnal. Emba
- Hall, James. (2011). Sistem Informasi Akuntansi. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat
- Hasan, Iqbal. (2006). Analisis Data Penelitian Dengan Statistik. Jakarta: PT.Bumi Askara.
- Homenta, C, P. & Afandi, D. (2015). *Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Hulmahera Utara*. Jurnal. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Jaya, H, L. & Widuri, R. (2013) Analisis Potensi Pajak Hotel Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Berbintang di Surabaya. Jurnal. Fakultas Ekonomi. Universitas Padjadjaran. Mardiasmo. (2011). Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mahmudi. (2010). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UUP, AMP, YKPN
- Mulyadi. (2013). Sistem Akuntansi. Edisi 4. Jakarta:Salemba Empat
- Nazir, M. (2013). Metodologi Penelitian. Jakarta: Balai Aksara.
- Paramita, Vidya. (2013). Pengaruh Hasil Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi. Universitas Widyatama.